

## 1. Data Penanganan dugaan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pada Pemilu 2019



Berdasarkan gambar diketahui bahwa dugaan pelanggaran Administrasi adalah jenis pelanggaran yang paling tertinggi sebanyak 12 kasus, yang semuanya telah diteruskan ke KPU Sumba Timur, dugaan pelanggaran Tindak Pidana sebanyak 7 kasus, namun 6 kasus dihentikan karena tidak memenuhi unsur Materiil, kemudian diikuti oleh dugaan pelanggaran Netralitas ASN sebanyak 6 kasus yang diteruskan ke Komisi ASN dan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebanyak 2 kasus yang ditangani oleh Bawaslu Sumba Timur

Trend pelaku dugaan pelanggaran Administrasi paling banyak dilakukan oleh KPU Sumba Timur terkait dugaan pelanggaran pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan dan distribusi Logistik, diikuti oleh dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Legislatif sebanyak 3 kasus, khususnya pada tahapan Kampanye, dugaan pelanggaran yang

dilakukan oleh KPPS sebanyak 2 kasus dan PPK sebanyak 3 kasus pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara

Trend pelaku dugaan pelanggaran Tindak Pidana paling banyak dilakukan oleh Warga masyarakat sebanyak 3 kasus terkait dengan dugaan pengrusakan baliho Calon Legislatif Sumba Timur dan dugaan pencoblosan 2 kali pada 2 TPS, diikuti oleh pelanggaran yang dilakukan Calon Legislatif Sumba Timur sebanyak 2 kasus terkait dengan dugaan pembagian uang pada masa tenang dan dugaan mengarahkan pemilih untuk memilih caleg tertentu di TPS, pelanggaran yang dilakukan oleh ASN terkait dugaan pembagian Kartu Caleg Partai Nasdem dan menghimbau masyarakat untuk memilih caleg tertentu dari Partai Nasdem dan pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa terkait dugaan membagi KTA Partai Golkar kepada warga desa

Trend dugaan pelanggaran Netralitas ASN dilakukan oleh 6 orang ASN dengan cara penggunaan Mobil dinas untuk mengikuti kegiatan kampanye Partai Politik(1 kasus), dan dugaan memberikan komentar pada akun media social yang mendukung salah satu caleg tertentu(5 kasus).

Penyelesaian sengketa proses Pemilu ditangani oleh Bawaslu Sumba Timur terkait permohonan pemohon dan Partai Garuda melawan KPU Sumba Timur yang diselesaikan dengan Pembacaan Putusan dalam sidang Adjudikasi, dan permohonan Pemohon Partai Hanura yang diselesaikan dengan pembuatan Berita Acara Mencapai Permufakatan